KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KRISNA PAGU ALOKASI ANGGARAN

KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2021

REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. VISI : Kementerian Dalam Negeri yang adaptif, proaktif dan inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

3. MISI :
1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibum-linmas

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2.950.000,0
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	16.068.000,0
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3.600.000,0
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	300.000,0
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	13.400.000,0
Total		36.318.000,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		136.876.418,0
01.01	Indeks Demokrasi Indonesia	77,72	
01.02	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	-	
01.03	Indeks Kinerja Ormas	270	
02	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		6.280.000,0
02.01	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,385	
02.02	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,2	
02.03	Daerah yang terpelihara kerukunan antar suku /intra suku, ras dan golongan	100%	
03	Meningkatnya kewaspadaan nasional		4.525.000,0
03.01	Timdu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif	62%	
03.02	Tertib pelaksanaan penelitian orang asing dan lembaga asing	470	
03.03	Aparatur Pusat dan Daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini	2.000 Orang	
04	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas		27.650.400,0
04.01	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	C (51% Daerah)	
04.02	Indeks kepuasaan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	Cukup memuaskan (20% daerah)	
05	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri		657.981.221,0
05.01	Persentase SDM aparatur pemerintahan dalam negeri yang tersertifikasi	87%	
05.02	Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri	Level 3 (80%)	
05.03	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Nilai 3 (80%)	
05.04	Persentase lulusan IPDN bersertifikat kompetensi	30%	
05.05	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	3,20	
06	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah		5.561.200,0
06.01	Indeks penyusunan produk hukum daerah	1 Dokumen	
07	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang efektif dan efisien		304.694.426,0
07.01	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	50%	
07.02	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	50	
07.03	Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Dokumen	
07.04	Rata-rata Indeks pengelolaan keuangan daerah	36,25	
07.05	Indeks kompetensi aparatur dan pengurus kelembagaan desa	3% Aparatur dan 2% Pengurus LKD	
07.06	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	85	
07.07	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	B	
07.08	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	18%	
07.09	Jumlah kelembagaan litbang daerah dengan kategori "utama"	82 Daerah	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
08	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		681.650.683,0
08.01	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	92% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	
08.02	Peningkatan jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	600 Lembaga Pengguna	
09	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan		144.648.090,0
09.01	Indeks Tata Kelola Penyeleng-garaan Kewilayahan	0,4	
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		1.219.708.912,0
10.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 90,01	
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		9.674.088,0
11.01	Indeks pengawasan Internal	85	
11.02	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	81	
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		5.450.000,0
12.01	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	45%	
	Total		3.204.700.438,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2022	2023	2024
010.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	58.003.000,0	0,0	68.531.606,0	0,0	11.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138.034.606,0	313.026.515,0	477.260.713,0	874.415.875,0
010.WA	Program Dukungan Manajemen	80.328.629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.328.629,0	200.251.573,0	496.191.432,0	1.245.364.685,0
Total		138.331.629,0	0,0	68.531.606,0	0,0	11.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218.363.235,0	513.278.088,0	973.452.145,0	2.119.780.560,0

Jakarta, 04 November 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP 196111030 198102 2 001

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. UNIT ORGANISASI : 06 - Ditjen Bina Pembangunan Daerah

3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
04 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
05 - Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
06 - Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah
07 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang efektif dan efisien
09 - Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
12 - Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

4. PROGRAM : Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2.950.000,0
01.04	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	500.000,0
01.06	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	2.450.000,0
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	16.068.000,0
02.01	Pembangunan Wilayah Sumatera	1.870.000,0
02.02	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	6.740.000,0
02.03	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	2.560.000,0
02.06	Pembangunan Wilayah Maluku	3.028.000,0
02.07	Pengembangan Wilayah Papua	1.870.000,0
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3.600.000,0
03.03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	700.000,0
03.04	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	400.000,0
03.05	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	2.100.000,0
03.07	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	400.000,0
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	300.000,0
04.04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	300.000,0
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	13.400.000,0
05.01	Infrastruktur Pelayanan Dasar	13.400.000,0
	Total	36.318.000,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
05	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional		138.034.606,0
05.01	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	50	
05.02	Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	22	
05.03	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	50	
05.04	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional	350	
05.05	Persentase SDM pemerintah daerah bidang manajemen pembangunan daerah sesuai rasio	20	
	Total		138.034.606,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
07	Kebijakan dan Layanan di bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.034.606,0
07.01	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
07.02	Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	
07.03	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	
07.04	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional	
07.05	Persentase SDM pemerintah daerah bidang manajemen pembangunan daerah sesuai rasio	
	Total	138.034.606,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2022	2023	2024
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	12.050.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.050.000,0	32.600.000,0	73.687.500,0	184.531.250,0
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	45.953.000,0	0,0	68.531.606,0	0,0	11.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125.984.606,0	280.426.515,0	403.573.213,0	689.884.625,0
Total		58.003.000,0	0,0	68.531.606,0	0,0	11.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138.034.606,0	313.026.515,0	477.260.713,0	874.415.875,0

Jakarta, 03 November 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.S
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. UNIT ORGANISASI : 06 - Ditjen Bina Pembangunan Daerah
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
   05 - Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
   07 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang efektif dan efisien
   10 - Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
   11 - Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
05	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri		78.006.629,0
05.05	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangda	Nilai 13	
05.15	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Nilai 10	
Total			78.006.629,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kementerian Dalam Negeri	80.328.629,0
01.05	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Pembangunan Daerah	
Total		80.328.629,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2022	2023	2024
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0	12.000.000,0	30.000.000,0	75.000.000,0
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70.382.229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.382.229,0	175.946.573,0	436.778.932,0	1.099.833.435,0
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0	5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1.324.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324.400,0	2.750.000,0	5.625.000,0	10.812.500,0
Total		80.328.629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.328.629,0	200.251.573,0	496.191.432,0	1.245.364.685,0

Jakarta, 03 November 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. PROGRAM : CM - Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar
02 - Meningkatnya kualitas standard dan kompetensi pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri
03 - Meningkatnya produk hukum daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah
04 - Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara
05 - Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
06 - Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jujur, bersih, dan transparan
07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
08 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien
09 - Meningkatnya kualitas inovasi daerah
10 - Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
11 - Meningkatnya perangkat litbang daerah berkategori "utama"

4. KEGIATAN : 1254 - Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
04	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD		12.050.000,0
04.01	Jumlah daerah dengan rencana program dan kegiatan pembangunan daerahnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah	34	
04.02	Jumlah daerah yang melaksanakan partisipasi masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	15	
04.03	Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional	22	
04.04	Jumlah daerah yang melaksanakan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah	22	
04.05	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional	350	
04.06	Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah yang disusun	1	
04.07	Jumlah Sistem Informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	1	
	Total		12.050.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD*										12.050.000,0
04.AAG	Peraturan Menteri										100.000,0
04.AAG.001	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022								000 - Bukan Tematik		100.000,0
	051 - Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										1.500.000,0
04.FAE.001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah								000 - Bukan Tematik		989.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Fasilitasi Ranperkada tentang RKPD Provinsi dan Ranperkada tentang Perubahan RKPD Provinsi										780.000,0
		Pusat	Pusat								780.000,0
	052 - Fasilitasi Pengendalian Perumusan Kebijakan RPJMD Provinsi dan Perubahan RPJMD Provinsi										209.000,0
		Pusat	Pusat								209.000,0
04.FAE.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah								000 - Bukan Tematik		511.000,0
	051 - Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi										461.000,0
		Pusat	Pusat								461.000,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										8.250.000,0
04.FBA.001	Fasilitasi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah								000 - Bukan Tematik		7.850.000,0
	051 - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan pusat dan daerah										6.850.000,0
		Pusat	Pusat								6.850.000,0
	052 - Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
	054 - Asistensi dan supervisi dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dalam penyusunan RKPD dan Musrenbangnas										700.000,0
		Pusat	Pusat								700.000,0
04.FBA.002	Fasilitasi Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
04.FBA.004	Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah								000 - Bukan Tematik		100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Asistensi dan supervisi penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
04.PAH	Peraturan lainnya										700.000,0
04.PAH.001	Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		700.000,0
	051 - Sosialisasi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
	052 - Fasilitasi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
04.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan										1.500.000,0
04.UAB.001	Sistem Informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Maluku	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	051 - Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPD										1.500.000,0
		Pusat	Pusat								1.500.000,0
Total											12.050.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
04	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD				12.050.000,0				32.600.000,0	73.687.500,0	184.531.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
04.AAG	Peraturan Menteri	1	PerMen		100.000,0				250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
04.AAG.001	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	1	PerMen		100.000,0	1	1	1	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
04.AAG.001.051	Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	1,0	Permen	100.000,0	100.000,0	1,0	1,0	1,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	68	Laporan		1.500.000,0				6.675.000,0	9.375.000,0	23.750.000,0
04.FAE.001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	34	Laporan		989.000,0	34	34	34	5.397.500,0	6.181.250,0	15.765.625,0
04.FAE.001.051	Fasilitasi Ranperkada tentang RKPD Provinsi dan Ranperkada tentang Perubahan RKPD Provinsi	34,0	Provinsi	22.941,2	780.000,0	34,0	34,0	34,0	4.875.000,0	4.875.000,0	12.500.000,0
04.FAE.001.052	Fasilitasi Pengendalian Perumusan Kebijakan RPJMD Provinsi dan Perubahan RPJMD Provinsi	34,0	Provinsi	6.147,1	209.000,0	34,0	34,0	34,0	522.500,0	1.306.250,0	3.265.625,0
04.FAE.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	34	Laporan		511.000,0	34	34	34	1.277.500,0	3.193.750,0	7.984.375,0
04.FAE.002.051	Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi	14,0	Laporan	3.571,4	50.000,0	22,0	24,0	34,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
04.FAE.002.052	Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi	20,0	Laporan	23.050,0	461.000,0	22,0	23,0	24,0	1.152.500,0	2.881.250,0	7.203.125,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	418	Daerah (Prov/Kab/Kota)		8.250.000,0				20.975.000,0	52.437.500,0	131.093.750,0
04.FBA.001	Fasilitasi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		7.850.000,0	34	34	34	19.625.000,0	49.062.500,0	122.656.250,0
04.FBA.001.051	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan pusat dan daerah	34,0	Provinsi	201.470,6	6.850.000,0	34,0	34,0	34,0	17.125.000,0	42.812.500,0	107.031.250,0
04.FBA.001.052	Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi	34,0	Provinsi	5.882,4	200.000,0	34,0	34,0	34,0	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
04.FBA.001.053	Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia	34,0	Provinsi	2.941,2	100.000,0	34,0	34,0	34,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
04.FBA.001.054	Asistensi dan supervisi dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dalam penyusunan RKPD dan Musrenbangnas	34,0	Provinsi	20.588,2	700.000,0	34,0	34,0	34,0	1.750.000,0	4.375.000,0	10.937.500,0
04.FBA.002	Fasilitasi Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		300.000,0	34	34	34	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
04.FBA.002.051	Asistensi dan Supervisi Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	34,0	Provinsi	8.823,5	300.000,0	34,0	34,0	34,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
04.FBA.004	Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	350	Daerah (Prov/Kab/Kota)		100.000,0	450	500	542	600.000,0	1.500.000,0	3.750.000,0
04.FBA.004.051	Asistensi dan supervisi penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	350,0	Daerah	285,7	100.000,0	450,0	500,0	542,0	600.000,0	1.500.000,0	3.750.000,0
04.PAH	Peraturan lainnya	1	peraturan		700.000,0				2.000.000,0	5.000.000,0	12.500.000,0
04.PAH.001	Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1	peraturan		700.000,0	1	1	1	2.000.000,0	5.000.000,0	12.500.000,0
04.PAH.001.051	Sosialisasi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1,0	Peraturan	400.000,0	400.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
04.PAH.001.052	Fasilitasi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	1,0	Peraturan	300.000,0	300.000,0	1,0	1,0	1,0	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
04.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi		1.500.000,0				2.700.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
04.UAB.001	Sistem Informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan	1	Sistem Informasi		1.500.000,0	1	1	1	2.700.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
04.UAB.001.051	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPD	1,0	Sistem	1.500.000,0	1.500.000,0	1,0	1,0	1,0	2.700.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
Total					12.050.000,0	-	-	-	32.600.000,0	73.687.500,0	184.531.250,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
04	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD		12.050.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.050.000,0
04.AAG	Peraturan Menteri		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.AAG.001	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.AAG.001.051	Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
04.FAE.001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		989.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	989.000,0
04.FAE.001.051	Fasilitasi Ranperkada tentang RKPD Provinsi dan Ranperkada tentang Perubahan RKPD Provinsi	Utama	780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780.000,0
04.FAE.001.052	Fasilitasi Pengendalian Perumusan Kebijakan RPJMD Provinsi dan Perubahan RPJMD Provinsi	Utama	209.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209.000,0
04.FAE.002	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		511.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511.000,0
04.FAE.002.051	Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
04.FAE.002.052	Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi	Utama	461.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461.000,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		8.250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.250.000,0
04.FBA.001	Fasilitasi Penyelarasan Perencanaan Pusat dan Daerah		7.850.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.850.000,0
04.FBA.001.051	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan pusat dan daerah	Utama	6.850.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.850.000,0
04.FBA.001.052	Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian dan Evaluasi	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.FBA.001.053	Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.FBA.001.054	Asistensi dan supervisi dalam rangka Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dalam penyusunan RKPD dan Musrenbangnas	Utama	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
04.FBA.002	Fasilitasi Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
04.FBA.002.051	Asistensi dan Supervisi Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Daerah	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
04.FBA.004	Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.FBA.004.051	Asistensi dan supervisi penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.PAH	Peraturan lainnya		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
04.PAH.001	Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
04.PAH.001.051	Sosialisasi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
04.PAH.001.052	Fasilitasi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
04.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
04.UAB.001	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
04.UAB.001.051	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIPD	Utama	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
Total			12.050.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.050.000,0

Jakarta, 19 Oktober 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. PROGRAM : CM - Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar
02 - Meningkatnya kualitas standard dan kompetensi pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri
03 - Meningkatnya produk hukum daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah
04 - Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara
05 - Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
06 - Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jujur, bersih, dan transparan
07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
08 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien
09 - Meningkatnya kualitas inovasi daerah
10 - Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
11 - Meningkatnya perangkat litbang daerah berkategori "utama"

4. KEGIATAN : 6139 - Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Ditjen Bina Pembangunan Daerah

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah		125.984.606,0
01.01	Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan daerah	22	
01.02	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	50	
01.03	Jumlah kebijakan/regulasi di bidang pembangunan daerah yang disusun	2	
01.04	Jumlah daerah yang menyusun perda tentang rencana tata ruang dalam rangka pemindahan Ibukota negara	3	
01.05	Jumlah daerah yang mengendalikan Pencapaian target RUED-P	16	
01.06	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan penataan akses dalam rangka penyelenggaraan reforma agraria di daerah	34	
01.07	Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (PPM) di bidang energi dan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)	7	
01.08	Jumlah daerah yang melaksanakan penguatan Ketahanan Pangan	34	
01.09	Jumlah daerah yang menerapkan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (TP)	4	
01.10	Jumlah daerah yang membina Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	8	
01.11	Jumlah daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	9	
01.12	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	184	
01.13	Jumlah daerah yang melaksanakan layanan metrologi legal sesuai dengan peraturan perundangan	7	
01.14	Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan	5	
01.15	Jumlah daerah yang mengoptimalkan Peran Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha	15	
01.16	Jumlah daerah yang menyederhanakan regulasi dan kebijakan terkait penanaman modal dan investasi di daerah	20	
01.17	Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan tentang pelayanan Kesehatan	10	
01.18	Jumlah provinsi yang mendapatkan rekomendasi hasil pengendalian rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Industri	4	
01.19	Jumlah provinsi yang melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dalam rangka perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10	
01.20	Jumlah daerah sebagai pilot project melaksanakan promosi dan kemudahan berusaha bagi UMKM	17	
01.21	Jumlah daerah melaksanakan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) dalam dokumen perencanaan daerah	5	
01.22	Jumlah daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	6	
01.23	Jumlah daerah yang melakukan evaluasi ranperda tentang RZWP3K di daerah dan pengendalian pelaksanaan Perda tentang RZWP3K dalam pengendalian Tata Ruang	10	
01.24	Jumlah daerah yang menyusun rencana induk transportasi	9	
01.25	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan	1	
01.26	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penguatan pokja daerah GDPK 5 Pilar	10	
01.27	Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja	7	
01.28	Jumlah daerah yang mendapatkan rekomendasi penyelesaian permasalahan transmigrasi	6	
01.29	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam peningkatan Sport Development Index (SDI) untuk mendukung pembangunan olahraga secara nasional	18	
01.30	Jumlah daerah yg mendapat rekomendasi terhadap penyelenggaraan penerapan kearsipan	18	
01.31	Persentase pemenuhan SDM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah IV yang kompeten sesuai rasio	20	
01.32	Jumlah daerah yang mengimplementasikan pengelolaan lahan pertanian beririgasi yang terintegrasi - IPDMIP	88	
01.33	Jumlah daerah yang menyusun perencanaan dan pengendalian resiko banjir pada area cekungan tangkapan sungai - FMSRB	5	
01.34	Jumlah daerah yang meningkatkan pengelolaan sampah terpadu perkotaan di kawasan sungai citarum (ISWMP)	8	
01.35	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam Program Penguatan Kapasitas Percepatan Penurunan Stunting (INEY)	360	
01.36	Jumlah daerah yang menerapkan program pengelolaan sumber daya air strategis (SIMURP)	18	
01.37	Jumlah daerah yang kapasitas kelembagaan daerahnya meningkat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat (NAHP)	12	
01.38	Jumlah daerah yang menerapkan program penyediaan air minum perkotaan di kawasan permukiman (NUWSP)	12	
01.39	Jumlah Kota yang melakukan Perencanaan terpadu dalam pembangunan daerah (NUDP)	5	
01.40	Jumlah daerah yang menyusun RAD AMPL dan memiliki peningkatan APBD terkait sanitasi dan air minum (Pamsimas)	45	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01.42	Jumlah daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus)	23	
01.43	Jumlah Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	6	
01.44	Jumlah daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RDTR di lokasi OSS	20	
01.45	Jumlah provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11	
01.46	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	360	
01.47	Jumlah Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	10	
01.48	Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	10	
01.49	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	10	
01.50	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem melalui Sistem Informasi untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	10	
01.51	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	17	
01.52	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	17	
01.53	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	49	
01.54	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	10	
01.55	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	10	
01.56	Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK	7	
01.57	Jumlah Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	7	
01.58	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	50	
01.59	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	22	
01.60	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	20	
01.61	Jumlah daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	22	
01.62	Jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	18	
01.63	Jumlah Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi sesuai dengan peraturan perundangan	34	
01.64	Indeks gemar membaca di daerah	54,75	
	Total		125.984.606,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah*										125.984.606,0
01.AAG	Peraturan Menteri										350.000,0
01.AAG.001	Revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Penyusunan Permendagri tentang Revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
01.AAG.002	Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Penyusunan Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										1.735.000,0
01.AFA.001	NSPK dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disinkronkan								000 - Bukan Tematik		1.735.000,0
	051 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang										40.000,0
		Pusat	Pusat								40.000,0
	052 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral										200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pertanian dan Pangan										120.000,0
		Pusat	Pusat								120.000,0
	054 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kehutanan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	055 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Lingkungan Hidup										175.000,0
		Pusat	Pusat								175.000,0
	056 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kesehatan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	057 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kelautan dan Perikanan										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	058 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Perhubungan										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
	059 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	060 - dentifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pendidikan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	061 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
	062 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	063 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	064 - Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
01.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara										190.000,0
01.FAC.001	SDM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah IV yang ditingkatkan kapasitasnya								000 - Bukan Tematik		190.000,0
	051 - Bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan rasio SDM pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah IV										190.000,0
		Pusat	Pusat								190.000,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										750.000,0
01.FAE.001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri								000 - Bukan Tematik		250.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
01.FAE.002	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang RZWP3K								000 - Bukan Tematik		250.000,0
	051 - Evaluasi Ranperda tentang RZWP3K daerah										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
01.FAE.003	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Perda tentang RZWP3K dalam Pengendalian Rencana Tata Ruang								000 - Bukan Tematik		250.000,0
	051 - Penyusunan Instrumen Pengendalian Pelaksanaan Perda tentang RZWP3K dalam Pengendalian Rencana Tata Ruang										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										88.841.606,0
01.FBA.001	Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah								000 - Bukan Tematik		3.025.000,0
	051 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral										385.000,0
		Pusat	Pusat								385.000,0
	053 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan Pangan										80.000,0
		Pusat	Pusat								80.000,0
	054 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kehutanan										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
	055 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
	056 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	057 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Sosial dan Budaya										0,0
	058 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	059 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perindustrian dan Perdagangan										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	060 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri										0,0
	061 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum										25.000,0
		Pusat	Pusat								25.000,0
	062 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Permukiman										25.000,0
		Pusat	Pusat								25.000,0
	063 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	064 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
	065 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	066 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan										130.000,0
		Pusat	Pusat								130.000,0
	067 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	068 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										130.000,0
		Pusat	Pusat								130.000,0
	069 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
	070 - Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.FBA.002	Fasilitasi Penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dalam Rangka Pemindahan Ibukota								000 - Bukan Tematik		70.000,0
	051 - Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi										70.000,0
		Pusat	Pusat								70.000,0
01.FBA.003	Fasilitasi Pencapaian Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi terhadap pelaksanaan pengendalian pencapaian target rencana umum energi daerah										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.FBA.004	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Reforma Agraria								000 - Bukan Tematik		70.000,0
	051 - Penyelenggaraan Pelaksanaan penataan akses dalam rangka pencapaian reforma agraria di daerah										70.000,0
		Pusat	Pusat								70.000,0
01.FBA.005	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Penghapusan Merkuri Bidang Energi Pertambangan Emas Skala Kecil								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah terkait Pertambangan Rakyat berizin										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
01.FBA.006	Fasilitasi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah								000 - Bukan Tematik		100.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan penguatan ketahanan pangan										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
01.FBA.007	Fasilitasi Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat								000 - Bukan Tematik		2.000.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
	052 - Implementasi pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat										1.600.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan								400.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon								400.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu								400.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang								400.000,0
01.FBA.008	Fasilitasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial Daerah								000 - Bukan Tematik		320.000,0
	051 - Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial di daerah										320.000,0
		Pusat	Pusat								320.000,0
01.FBA.009	Fasilitasi Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD								000 - Bukan Tematik		175.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi daerah dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)										175.000,0
		Pusat	Pusat								175.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.FBA.010	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan Daerah								000 - Bukan Tematik		100.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pengendalian persampahan di daerah										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
01.FBA.011	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Metrologi Legal Daerah								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan pelaksanaan layanan metrologi legal di daerah sesuai dengan peraturan perundangan										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.FBA.012	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
01.FBA.013	Fasilitasi Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha Daerah								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam fasilitasi pembentukan peran satgas kemudahan berusaha										75.000,0
		Pusat	Pusat								75.000,0
	052 - Koordinasi dengan K/L dalam rangka fasilitasi pembentukan satgas kemudahan berusaha										75.000,0
		Pusat	Pusat								75.000,0
01.FBA.014	Fasilitasi Penerapan Penyederhanaan Regulasi dan Kebijakan terkait Penanaman Modal dan Investasi Daerah								000 - Bukan Tematik		600.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan penyedehanaan regulasi dan kebijakan terkait dengan penanaman modal										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
	052 - Asistensi dan supervisi daerah yang menyederhanakan perizinan dan pelayanan kemudahan berinvestasi										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.FBA.015	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Supervisi Pelaksanaan Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
01.FBA.017	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.FBA.018	Fasilitasi Promosi dan Kemudahan Berusaha UMKM Daerah								000 - Bukan Tematik		150.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Asistensi dan supervisi daerah sebagai pilot project dalam melaksanakan promosi dan kemudahan berusaha bagi UMKM										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.FBA.019	Fasilitasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah								000 - Bukan Tematik		50.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi dalam rangka penyusunan dan penerapan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD)										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
01.FBA.020	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan daerah								000 - Bukan Tematik		250.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
01.FBA.022	Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Rencana Induk Transportasi								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi daerah dalam melakukan pengendalian RTR										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
01.FBA.023	Fasilitasi Kampung Nelayan Sejahtera								000 - Bukan Tematik		100.000,0
	051 - Pengumpulan Data terkait Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di daerah										60.000,0
		Pusat	Pusat								60.000,0
	052 - Analisis dan Penyusunan Model Kampung Nelayan Sejahtera										40.000,0
		Pusat	Pusat								40.000,0
01.FBA.024	Fasilitasi Penguatan Pokja Daerah yang telah Menyusun GDPK 5 Pilar								000 - Bukan Tematik		250.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi dalam penguatan pokja daerah GDPK 5 Pilar										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
01.FBA.025	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Daerah								000 - Bukan Tematik		100.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
01.FBA.026	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Transmigrasi								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam menyelesaikan permasalahan di Kawasan Transmigrasi										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.FBA.027	Fasilitasi Penerapan SDI Pembangunan Olahraga Nasional								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan Sport Development Index (SDI) untuk mendukung pembangunan olahraga secara nasional										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.FBA.028	Fasilitasi penyelenggaraan penerapan kearsipan								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi daerah dalam penyelenggaraan penerapan kearsipan										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
01.FBA.029	Fasilitasi Implementasi Lahan Pertanian Beririgasi yang Terintegrasi (IPDMIP)								000 - Bukan Tematik		24.627.212,0
	051 - Asistensi dan supervisi pengelolaan lahan pertanian pangan beririgasi secara partisipatif										24.627.212,0
		Pusat	Pusat								24.627.212,0
01.FBA.030	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Resiko Banjir di Daerah Terpilih pada Area Cekungan Tangkapan Sungai (FMSRB)								000 - Bukan Tematik		12.000.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah terpilih dalam perencanaan dan pengendalian resiko banjir pada area cekungan tangkapan sungai										12.000.000,0
		Pusat	Pusat								12.000.000,0
01.FBA.031	Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan dan melaksanakan pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan hidup										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
	052 - Pengelolaan manajemen persampahan terpadu di daerah terpilih yang partisipatif										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.FBA.032	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)								000 - Bukan Tematik		11.000.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan penurunan stunting										10.200.000,0
		Pusat	Pusat								10.200.000,0
	052 - Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penilaian kinerja										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
01.FBA.033	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategis (SIMURP)								000 - Bukan Tematik		20.334.394,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya air										18.334.394,0
		Pusat	Pusat								18.334.394,0
	052 - Asistensi dan supervisi dalam manajemen data dan informasi sumber daya air/irigasi di daerah										2.000.000,0
		Pusat	Pusat								2.000.000,0
01.FBA.034	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Terjangkau Bagi Masyarakat Berbasis Kelembagaan Daerah (NAHP)								000 - Bukan Tematik		500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Asistensi dan supervisi daerah di dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berbasis kelembagaan										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.FBA.035	Fasilitasi Penyediaan Air Minum Perkotaan Kawasan Permukiman (NUSWP)								000 - Bukan Tematik		9.070.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah di dalam Penyediaan Air Minum perkotaan di kawasan permukiman (NUSWP)										9.070.000,0
		Pusat	Pusat								9.070.000,0
01.FBA.036	Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi perencanaan terpadu di perkotaan										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
	052 - Asistensi dan Supervisi Perencanaan Berbasis Potensi Daerah melalui SIPD dan Dukungan Implementasi NUDP										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.FBA.037	Fasilitasi Penyusunan RAD AMPL								000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam Penyusunan RAD AMPL dan memiliki peningkatan APBD terkait sanitasi dan air minum (Pamsimas)										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										34.118.000,0
01.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sanitasi				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		1.870.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Sanitasi										1.570.000,0
		Pusat	Pusat								1.570.000,0
	052 - Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang sanitasi di daerah										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
01.UBA.002	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Perumahan				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Wilayah Papua	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		1.870.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang air minum dan perumahan										1.358.000,0
		Pusat	Pusat								1.358.000,0
	052 - Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Air Minum dan Perumahan di daerah										512.000,0
		Pusat	Pusat								512.000,0
01.UBA.003	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		1.860.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Kesehatan										1.210.000,0
		Pusat	Pusat								1.210.000,0
	052 - Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Kesehatan di daerah										650.000,0
		Pusat	Pusat								650.000,0
01.UBA.004	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		1.880.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Sosial										1.380.000,0
		Pusat	Pusat								1.380.000,0
	052 - Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Sosial di daerah										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.005	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		1.860.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Trantibumlinmas										1.360.000,0
		Pusat	Pusat								1.360.000,0
	052 - Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Trantibumlinmas di daerah										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.006	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Maluku	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	000 - Bukan Tematik		1.528.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Pendidikan										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
	052 - Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang bidang Pendidikan di daerah										528.000,0
		Pusat	Pusat								528.000,0
01.UBA.007	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RTR di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	Pengembangan Kawasan Strategis	Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	000 - Bukan Tematik		3.000.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi Daerah dalam Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/KEK)										2.000.000,0
		Pusat	Pusat								2.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penataan Ruang dalam mendukung Pengelolaan Kawasan Khusus										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
01.UBA.008	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi Penyusunan dan Penerapan Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.009	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RDTR di lokasi OSS				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	000 - Bukan Tematik		800.000,0
	051 - Asistensi Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota untuk mendukung OSS										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
01.UBA.010	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	000 - Bukan Tematik		400.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
	052 - Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata										150.000,0
		Pusat	Pusat								150.000,0
	053 - Monev atas penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
01.UBA.011	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Penurunan Stunting	000 - Bukan Tematik		400.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
	052 - Asistensi dan supervisi daerah yang melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.UBA.012	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Fasilitasi dan sinkronisasi penyesuaian dokumen perencanaan daerah dengan Perda RZWP3K										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
	052 - Koordinasi lintas sektor pusat tindak lanjut sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan PERDA RZWP3K										250.000,0
		Pusat	Pusat								250.000,0
01.UBA.013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi provinsi dalam melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi provinsi dalam meningkatkan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi provinsi dalam meningkatkan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air Minum dan sanitasi layak dan aman										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	000 - Bukan Tematik		5.000.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi provinsi dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi										5.000.000,0
		Pusat	Pusat								5.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.UBA.017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	000 - Bukan Tematik		2.500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi provinsi dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi										2.500.000,0
		Pusat	Pusat								2.500.000,0
01.UBA.018	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	000 - Bukan Tematik		1.400.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman										1.400.000,0
		Pusat	Pusat								1.400.000,0
01.UBA.019	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA	000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi program pengelolaan Sumber Daya Air di daerah										1.500.000,0
		Pusat	Pusat								1.500.000,0
01.UBA.020	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana	000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi pusat dan daerah dalam rangka integrasi rencana aksi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan untuk mengatasi resiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan										1.500.000,0
		Pusat	Pusat								1.500.000,0
01.UBA.021	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	000 - Bukan Tematik		400.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam pengimplementasian kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres No.9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
01.UBA.022	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	000 - Bukan Tematik		400.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.UBA.023	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi dalam pengintegrasian rencana aksi untuk mendukung program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak di daerah										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
01.UBA.024	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	003 - Anggaran Responsif Gender		500.000,0
	051 - Integrasi dan penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang	000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam peningkatan koordinasi pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.026	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universalnya	000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Asistensi dan Supervisi daerah dalam melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
01.UBA.027	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Kualitas Pemuda	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	000 - Bukan Tematik		600.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan										600.000,0
		Pusat	Pusat								600.000,0
01.UBA.028	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	000 - Bukan Tematik		750.000,0
	051 - Asistensi dan evaluasi dalam penetapan upah minimum provinsi										750.000,0
		Pusat	Pusat								750.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.UBA.029	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah				Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Peningkatan Budaya Literasi	Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca	000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Asistensi dan supervisi dalam peningkatan indeks gemar membaca di daerah										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
Total											125.984.606,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah				125.984.606,0				280.426.515,0	403.573.213,0	689.884.625,0
01.AAG	Peraturan Menteri	2	PerMen		350.000,0				875.000,0	2.187.500,0	4.993.750,0
01.AAG.001	Revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah	1	PerMen		200.000,0	1	1	1	500.000,0	1.250.000,0	2.650.000,0
01.AAG.001.051	Penyusunan Permendagri tentang Revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah	1,0	PerMen	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	1.250.000,0	2.650.000,0
01.AAG.002	Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	1	PerMen		150.000,0	1	1	1	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.AAG.002.051	Penyusunan Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	1,0	PerMen	150.000,0	150.000,0	1,0	1,0	1,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14	NSPK		1.735.000,0				4.337.500,0	10.843.250,0	27.109.625,0
01.AFA.001	NSPK dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disinkronkan	14	NSPK		1.735.000,0	28	56	100	4.337.500,0	10.843.250,0	27.109.625,0
01.AFA.001.051	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang	1,0	NSPK	40.000,0	40.000,0	2,0	3,0	4,0	100.000,0	250.000,0	625.000,0
01.AFA.001.052	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	1,0	NSPK	200.000,0	200.000,0	2,0	3,0	4,0	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
01.AFA.001.053	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pertanian dan Pangan	1,0	NSPK	120.000,0	120.000,0	2,0	3,0	4,0	300.000,0	750.000,0	1.875.000,0
01.AFA.001.054	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kehutanan	1,0	NSPK	50.000,0	50.000,0	2,0	3,0	4,0	125.000,0	312.000,0	781.250,0
01.AFA.001.055	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Lingkungan Hidup	1,0	NSPK	175.000,0	175.000,0	2,0	3,0	4,0	437.500,0	1.093.750,0	2.734.375,0
01.AFA.001.056	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kesehatan	1,0	NSPK	50.000,0	50.000,0	2,0	3,0	4,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.AFA.001.057	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kelautan dan Perikanan	1,0	NSPK	300.000,0	300.000,0	2,0	3,0	4,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
01.AFA.001.058	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Perhubungan	1,0	NSPK	150.000,0	150.000,0	2,0	3,0	4,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.AFA.001.059	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	1,0	NSPK	300.000,0	300.000,0	2,0	3,0	4,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
01.AFA.001.060	dentifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pendidikan	1,0	NSPK	50.000,0	50.000,0	2,0	3,0	4,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.AFA.001.061	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,0	NSPK	100.000,0	100.000,0	2,0	3,0	4,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.AFA.001.062	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,0	NSPK	50.000,0	50.000,0	2,0	3,0	4,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.AFA.001.063	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,0	NSPK	50.000,0	50.000,0	2,0	3,0	4,0	125.000,0	312.500,0	781.500,0
01.AFA.001.064	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	1,0	NSPK	100.000,0	100.000,0	2,0	3,0	4,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	110	Orang		190.000,0				475.000,0	1.187.500,0	2.968.750,0
01.FAC.001	SDM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah IV yang ditingkatkan kapasitasnya	110	Orang		190.000,0	200	320	540	475.000,0	1.187.500,0	2.968.750,0
01.FAC.001.051	Bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan rasio SDM pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah IV	110,0	Orang	1.727,3	190.000,0	200,0	320,0	540,0	475.000,0	1.187.500,0	2.968.750,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	12	Laporan		750.000,0				1.875.000,0	4.375.000,0	14.062.500,0
01.FAE.001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri	4	Laporan		250.000,0	4	4	3	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.FAE.001.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri	4,0	Provinsi	62.500,0	250.000,0	4,0	4,0	3,0	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.FAE.002	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang RZWP3K	7	Laporan		250.000,0	4	4	3	625.000,0	1.250.000,0	6.250.000,0
01.FAE.002.051	Evaluasi Ranperda tentang RZWP3K daerah	7,0	Provinsi	35.714,3	250.000,0	4,0	4,0	3,0	625.000,0	1.250.000,0	6.250.000,0
01.FAE.003	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Perda tentang RZWP3K dalam Pengendalian Rencana Tata Ruang	1	Laporan		250.000,0	2	3	4	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.FAE.003.051	Penyusunan Instrumen Pengendalian Pelaksanaan Perda tentang RZWP3K dalam Pengendalian Rencana Tata Ruang	1,0	Laporan	250.000,0	250.000,0	2,0	3,0	4,0	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1050	Daerah (Prov/Kab/Kota)		88.841.606,0				192.154.015,0	194.777.463,0	165.468.750,0
01.FBA.001	Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		3.025.000,0	34	34	34	7.587.500,0	18.906.250,0	47.265.625,0
01.FBA.001.051	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang	34,0	Provinsi	1.470,6	50.000,0	34,0	34,0	34,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.001.052	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	34,0	Provinsi	11.323,5	385.000,0	34,0	34,0	34,0	962.500,0	2.406.250,0	6.015.625,0
01.FBA.001.053	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan Pangan	34,0	Provinsi	2.352,9	80.000,0	34,0	34,0	34,0	200.000,0	500.000,0	1.250.000,0
01.FBA.001.054	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kehutanan	34,0	Provinsi	4.411,8	150.000,0	34,0	34,0	34,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.001.055	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup	34,0	Provinsi	2.941,2	100.000,0	34,0	34,0	34,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.001.056	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	34,0	Provinsi	1.470,6	50.000,0	34,0	34,0	34,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.001.057	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Sosial dan Budaya	0,0	Provinsi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.001.058	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal	34,0	Provinsi	2.941,2	100.000,0	34,0	34,0	34,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.001.059	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perindustrian dan Perdagangan	34,0	Provinsi	8.823,5	300.000,0	34,0	34,0	34,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
01.FBA.001.060	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri	0,0	Provinsi	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.001.061	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum	34,0	Provinsi	735,3	25.000,0	34,0	34,0	34,0	62.500,0	156.250,0	390.625,0
01.FBA.001.062	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Permukiman	34,0	Provinsi	735,3	25.000,0	34,0	34,0	34,0	62.500,0	156.250,0	390.625,0
01.FBA.001.063	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	34,0	Provinsi	8.823,5	300.000,0	34,0	34,0	34,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
01.FBA.001.064	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan	34,0	Provinsi	4.411,8	150.000,0	34,0	34,0	34,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.001.065	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	34,0	Provinsi	5.882,4	200.000,0	34,0	34,0	34,0	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
01.FBA.001.066	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	34,0	Provinsi	3.823,5	130.000,0	34,0	34,0	34,0	325.000,0	812.500,0	2.031.250,0
01.FBA.001.067	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	34,0	Provinsi	5.882,4	200.000,0	34,0	34,0	34,0	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
01.FBA.001.068	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34,0	Provinsi	3.823,5	130.000,0	34,0	34,0	34,0	350.000,0	812.500,0	2.031.250,0
01.FBA.001.069	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34,0	Provinsi	7.352,9	250.000,0	34,0	34,0	34,0	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.FBA.001.070	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.	34,0	Provinsi	11.764,7	400.000,0	34,0	34,0	34,0	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.FBA.002	Fasilitasi Penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dalam Rangka Pemindahan Ibukota	3	Daerah (Prov/Kab/Kota)		70.000,0	2	1	0	175.000,0	437.500,0	0,0
01.FBA.002.051	Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi	3,0	Daerah	23.333,3	70.000,0	2,0	1,0	0,0	175.000,0	437.500,0	0,0
01.FBA.003	Fasilitasi Pencapaian Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P	16	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	25	30	34	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.003.051	Asistensi dan supervisi terhadap pelaksanaan pengendalian pencapaian target rencana umum energi daerah	16,0	Provinsi	9.375,0	150.000,0	25,0	30,0	34,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.004	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Reforma Agraria	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		70.000,0	34	34	34	175.000,0	437.500,0	1.093.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.FBA.004.051	Penyelenggaraan Pelaksanaan penataan akses dalam rangka pencapaian reforma agraria di daerah	34,0	Provinsi	2.058,8	70.000,0	34,0	34,0	34,0	175.000,0	437.500,0	1.093.750,0
01.FBA.005	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Penghapusan Merkuri Bidang Energi Pertambangan Emas Skala Kecil	7	Daerah (Prov/Kab/Kota)		50.000,0	25	30	34	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.005.051	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah terkait Pertambangan Rakyat berizin	7,0	Provinsi	7.142,9	50.000,0	25,0	30,0	34,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.006	Fasilitasi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		100.000,0	34	34	34	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.006.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan penguatan ketahanan pangan	34,0	Provinsi	2.941,2	100.000,0	34,0	34,0	34,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.007	Fasilitasi Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.000.000,0	4	4	4	5.000.000,0	12.500.000,0	31.250.000,0
01.FBA.007.051	Asistensi dan supervisi pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat	4,0	Kabupaten	100.000,0	400.000,0	4,0	4,0	0,0	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.FBA.007.052	Implementasi pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat	4,0	Kabupaten	400.000,0	1.600.000,0	4,0	4,0	4,0	4.000.000,0	10.000.000,0	25.000.000,0
01.FBA.008	Fasilitasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial Daerah	8	Daerah (Prov/Kab/Kota)		320.000,0	12	15	20	800.000,0	2.000.000,0	5.000.000,0
01.FBA.008.051	Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial di daerah	8,0	Provinsi	40.000,0	320.000,0	13,0	15,0	20,0	800.000,0	2.000.000,0	5.000.000,0
01.FBA.009	Fasilitasi Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)		175.000,0	15	20	25	437.500,0	1.093.750,0	2.734.375,0
01.FBA.009.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	9,0	Provinsi	19.444,4	175.000,0	0,0	0,0	0,0	437.500,0	1.093.750,0	2.734.375,0
01.FBA.010	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan Daerah	184	Daerah (Prov/Kab/Kota)		100.000,0	284	384	448	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.010.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pengendalian persampahan di daerah	184,0	Daerah	543,5	100.000,0	284,0	384,0	448,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.011	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Metrologi Legal Daerah	7	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	13	10	4	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.011.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan pelaksanaan layanan metrologi legal di daerah sesuai dengan peraturan perundangan	7,0	Provinsi	21.428,6	150.000,0	13,0	10,0	4,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.012	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)		50.000,0	10	10	14	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.012.051	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan	5,0	Daerah	10.000,0	50.000,0	5,0	10,0	14,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.013	Fasilitasi Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha Daerah	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	25	30	34	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.013.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam fasilitasi pembentukan peran satgas kemudahan berusaha	15,0	Provinsi	5.000,0	75.000,0	25,0	30,0	34,0	187.500,0	468.750,0	1.171.875,0
01.FBA.013.052	Koordinasi dengan K/L dalam rangka fasilitasi pembentukan satgas kemudahan berusaha	15,0	Provinsi	5.000,0	75.000,0	25,0	30,0	34,0	187.500,0	468.750,0	1.171.875,0
01.FBA.014	Fasilitasi Penerapan Penyederhanaan Regulasi dan Kebijakan terkait Penanaman Modal dan Investasi Daerah	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)		600.000,0	25	30	34	1.500.000,0	3.750.000,0	9.375.000,0
01.FBA.014.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan penyederhanaan regulasi dan kebijakan terkait dengan penanaman modal	20,0	Daerah	5.000,0	100.000,0	25,0	30,0	34,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.014.052	Asistensi dan supervisi daerah yang menyederhanakan perizinan dan pelayanan kemudahan berinvestasi	20,0	Daerah	25.000,0	500.000,0	25,0	30,0	34,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.FBA.015	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		50.000,0	15	20	25	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.015.051	Supervisi Pelaksanaan Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah	10,0	Kab/Kota	5.000,0	50.000,0	15,0	20,0	25,0	125.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.017	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	7	5	3	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.017.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10,0	Provinsi	15.000,0	150.000,0	7,0	5,0	3,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.018	Fasilitasi Promosi dan Kemudahan Berusaha UMKM Daerah	17	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	24	34	0	375.000,0	937.500,0	0,0
01.FBA.018.051	Asistensi dan supervisi daerah sebagai pilot project dalam melaksanakan promosi dan kemudahan berusaha bagi UMKM	17,0	Provinsi	8.823,5	150.000,0	24,0	34,0	0,0	375.000,0	937.500,0	0,0
01.FBA.019	Fasilitasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)		50.000,0	15	20	25	150.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.019.051	Asistensi dan supervisi dalam rangka penyusunan dan penerapan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD)	5,0	Daerah	10.000,0	50.000,0	15,0	20,0	25,0	150.000,0	312.500,0	781.250,0
01.FBA.020	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan daerah	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)		250.000,0	7	8	8	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.FBA.020.051	Asistensi dan supervisi penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah	6,0	Provinsi	41.666,7	250.000,0	7,0	8,0	8,0	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.FBA.022	Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Rencana Induk Transportasi	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)		200.000,0	10	12	12	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
01.FBA.022.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam melakukan pengendalian RTR	9,0	Provinsi	22.222,2	200.000,0	10,0	12,0	12,0	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
01.FBA.023	Fasilitasi Kampung Nelayan Sejahtera	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)		100.000,0	1	1	1	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.023.051	Pengumpulan Data terkait Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di daerah	1,0	Daerah	60.000,0	60.000,0	15,0	21,0	21,0	150.000,0	375.000,0	937.500,0
01.FBA.023.052	Analisis dan Penyusunan Model Kampung Nelayan Sejahtera	1,0	Daerah	40.000,0	40.000,0	15,0	15,0	21,0	100.000,0	250.000,0	625.000,0
01.FBA.024	Fasilitasi Penguatan Pokja Daerah yang telah Menyusun GDPK 5 Pilar	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		250.000,0	15	20	25	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.FBA.024.051	Asistensi dan Supervisi dalam penguatan pokja daerah GDPK 5 Pilar	10,0	Daerah	25.000,0	250.000,0	15,0	20,0	25,0	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.FBA.025	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Daerah	7	Daerah (Prov/Kab/Kota)		100.000,0	14	24	34	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.025.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah	7,0	Provinsi	14.285,7	100.000,0	14,0	24,0	34,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.FBA.026	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Transmigrasi	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	14	18	23	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.026.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menyelesaikan permasalahan di Kawasan Transmigrasi	6,0	Provinsi	25.000,0	150.000,0	14,0	18,0	23,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.027	Fasilitasi Penerapan SDI Pembangunan Olahraga Nasional	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)		200.000,0	24	30	34	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
01.FBA.027.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan Sport Development Index (SDI) untuk mendukung pembangunan olahraga secara nasional	18,0	Daerah	11.111,1	200.000,0	24,0	30,0	34,0	500.000,0	1.250.000,0	3.125.000,0
01.FBA.028	Fasilitasi penyelenggaraan penerapan kearsipan	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	24	30	34	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.028.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam penyelenggaraan penerapan kearsipan	18,0	Daerah	8.333,3	150.000,0	24,0	30,0	34,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0
01.FBA.029	Fasilitasi Implementasi Lahan Pertanian Beririgasi yang Terintegrasi (IPDMIP)	88	Daerah (Prov/Kab/Kota)		24.627.212,0	88	0	0	61.568.030,0	0,0	0,0
01.FBA.029.051	Asistensi dan supervisi pengelolaan lahan pertanian pangan beririgasi secara partisipatif	88,0	Daerah	279.854,7	24.627.212,0	88,0	0,0	0,0	61.568.030,0	0,0	0,0
01.FBA.030	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Resiko Banjir di Daerah Terpilih pada Area Cekungan Tangkapan Sungai (FMSRB)	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)		12.000.000,0	5	0	0	30.000.000,0	0,0	0,0
01.FBA.030.051	Asistensi dan supervisi daerah terpilih dalam perencanaan dan pengendalian resiko banjir pada area cekungan tangkapan sungai	5,0	Daerah	2.400.000,0	12.000.000,0	5,0	0,0	0,0	30.000.000,0	0,0	0,0
01.FBA.031	Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	8	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000,0	8	8	8	2.500.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
01.FBA.031.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan dan melaksanakan pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan hidup	8,0	Kab/Kota	62.500,0	500.000,0	8,0	8,0	8,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.FBA.031.052	Pengelolaan manajemen persampahan terpadu di daerah terpilih yang partisipatif	8,0	Kab/Kota	62.500,0	500.000,0	8,0	8,0	8,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.FBA.032	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)	360	Daerah (Prov/Kab/Kota)		11.000.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.032.051	Asistensi dan supervisi kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan penurunan stunting	360,0	Daerah	28.333,3	10.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.032.052	Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penilaian kinerja	360,0	Daerah	2.222,2	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.033	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategis (SIMURP)	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)		20.334.394,0	18	18	0	50.835.985,0	127.089.963,0	0,0
01.FBA.033.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya air	18,0	Daerah	1.018.577,4	18.334.394,0	18,0	18,0	0,0	45.835.985,0	114.589.963,0	0,0
01.FBA.033.052	Asistensi dan supervisi dalam manajemen data dan informasi sumber daya air/irigasi di daerah	18,0	Daerah	111.111,1	2.000.000,0	18,0	18,0	0,0	5.000.000,0	12.500.000,0	0,0
01.FBA.034	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Terjangkau Bagi Masyarakat Berbasis Kelembagaan Daerah (NAHP)	12	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.034.051	Asistensi dan supervisi daerah di dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berbasis kelembagaan	12,0	Daerah	41.666,7	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.035	Fasilitasi Penyediaan Air Minum Perkotaan Kawasan Permukiman (NUSWP)	12	Daerah (Prov/Kab/Kota)		9.070.000,0	12	0	0	22.675.000,0	0,0	0,0
01.FBA.035.051	Asistensi dan supervisi daerah di dalam Penyediaan Air Minum perkotaan di kawasan permukiman (NUSWP)	12,0	Daerah	755.833,3	9.070.000,0	12,0	0,0	0,0	22.675.000,0	0,0	0,0
01.FBA.036	Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.000.000,0	10	15	15	2.500.000,0	6.375.000,0	15.625.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.FBA.036.051	Asistensi dan supervisi perencanaan terpadu di perkotaan	5,0	Kota	100.000,0	500.000,0	10,0	15,0	15,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.FBA.036.052	Asistensi dan Supervisi Perencanaan Berbasis Potensi Daerah melalui SIPD dan Dukungan Implementasi NUDP	5,0	Daerah	100.000,0	500.000,0	10,0	15,0	15,0	1.250.000,0	3.250.000,0	7.812.500,0
01.FBA.037	Fasilitasi Penyusunan RAD AMPL	45	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.037.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam Penyusunan RAD AMPL dan memiliki peningkatan APBD terkait sanitasi dan air minum (Pamsimas)	45,0	Daerah	11.111,1	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3269.75	Daerah (Prov/Kab/Kota)		34.118.000,0				80.710.000,0	190.202.500,0	475.281.250,0
01.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sanitasi	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.870.000,0	412	412	412	4.675.000,0	11.687.500,0	29.218.750,0
01.UBA.001.051	Asistensi dan supervisi dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Sanitasi	412,0	Daerah	3.810,7	1.570.000,0	412,0	412,0	412,0	3.925.000,0	9.812.500,0	24.531.250,0
01.UBA.001.052	Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang sanitasi di daerah	412,0	Daerah	728,2	300.000,0	412,0	412,0	412,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
01.UBA.002	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Perumahan	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.870.000,0	412	412	412	4.675.000,0	11.687.500,0	29.218.750,0
01.UBA.002.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang air minum dan perumahan	412,0	Daerah	3.296,1	1.358.000,0	412,0	412,0	412,0	3.395.000,0	8.487.500,0	21.218.750,0
01.UBA.002.052	Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Air Minum dan Perumahan di daerah	412,0	Daerah	1.242,7	512.000,0	412,0	412,0	412,0	1.280.000,0	3.200.000,0	8.000.000,0
01UBA.003	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.860.000,0	412	412	412	4.650.000,0	11.625.000,0	29.062.500,0
01.UBA.003.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Kesehatan	412,0	Daerah	2.936,9	1.210.000,0	412,0	412,0	412,0	3.025.000,0	7.562.500,0	18.906.250,0
01.UBA.003.052	Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Kesehatan di daerah	412,0	Daerah	1.577,7	650.000,0	412,0	412,0	412,0	1.625.000,0	4.062.500,0	10.156.250,0
01.UBA.004	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.880.000,0	412	412	412	4.700.000,0	11.750.000,0	29.375.000,0
01.UBA.004.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Sosial	412,0	Daerah	3.349,5	1.380.000,0	412,0	412,0	412,0	3.450.000,0	8.625.000,0	21.562.500,0
01.UBA.004.052	Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Sosial di daerah	412,0	Daerah	1.213,6	500.000,0	412,0	412,0	412,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.005	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.860.000,0	412	412	412	4.650.000,0	11.625.000,0	29.062.500,0
01.UBA.005.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Trantibumlinmas	412,0	Daerah	3.301,0	1.360.000,0	412,0	412,0	412,0	3.400.000,0	8.500.000,0	21.250.000,0
01.UBA.005.052	Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang Trantibumlinmas di daerah	412,0	Daerah	1.213,6	500.000,0	412,0	412,0	412,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.006	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	412	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.528.000,0	412	412	412	3.820.000,0	9.550.000,0	23.875.000,0
01.UBA.006.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Pendidikan	412,0	Daerah	2.427,2	1.000.000,0	412,0	412,0	412,0	2.500.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
01.UBA.006.052	Monitoring dan evaluasi integrasi dan penerapan SPM bidang bidang Pendidikan di daerah	412,0	Daerah	1.281,6	528.000,0	412,0	412,0	412,0	1.320.000,0	3.300.000,0	8.250.000,0
01.UBA.007	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RTR di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	23	Daerah (Prov/Kab/Kota)		3.000.000,0	8	0	0	7.500.000,0	0,0	0,0
01.UBA.007.051	Asistensi dan Supervisi Daerah dalam Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/KEK)	23,0	Daerah	86.956,5	2.000.000,0	8,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0
01.UBA.007.052	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penataan Ruang dalam mendukung Pengelolaan Kawasan Khusus	23,0	Daerah	43.478,3	1.000.000,0	8,0	0,0	0,0	2.500.000,0	0,0	0,0
01.UBA.008	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	12	18	25	1.250.000,0	3.215.000,0	7.812.500,0
01.UBA.008.051	Asistensi dan Supervisi Penyusunan dan Penerapan Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	6,0	Provinsi	83.333,3	500.000,0	12,0	18,0	25,0	1.250.000,0	3.215.000,0	7.812.500,0
01.UBA.009	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RDTR di lokasi OSS	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)		800.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.UBA.009.051	Asistensi Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota untuk mendukung OSS	20,0	Daerah	40.000,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.UBA.010	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)		400.000,0	19	19	34	662.500,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.UBA.010.051	Asistensi dan supervisi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	11,0	Provinsi	13.636,4	150.000,0	19,0	34,0	34,0	375.000,0	937.500,0	2.343.750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.UBA.010.052	Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	11,0	Provinsi	13.636,4	150.000,0	19,0	19,0	34,0	37.500,0	937.500,0	2.343.750,0
01.UBA.010.053	Monev atas penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	11,0	Provinsi	9.090,9	100.000,0	19,0	19,0	34,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.UBA.011	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	360	Daerah (Prov/Kab/Kota)		400.000,0	460	512	512	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.011.051	Asistensi dan supervisi Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	360,0	Daerah	833,3	300.000,0	460,0	512,0	512,0	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.UBA.011.052	Asistensi dan supervisi daerah yang melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting	360,0	Daerah	277,8	100.000,0	460,0	512,0	512,0	250.000,0	625.000,0	1.562.500,0
01.UBA.012	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	17	24	34	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.012.051	Fasilitasi dan sinkronisasi penyesuaian dokumen perencanaan daerah dengan Perda RZWP3K	10,0	Daerah	25.000,0	250.000,0	17,0	24,0	34,0	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.UBA.012.052	Koordinasi lintas sektor pusat tindak lanjut sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan PERDA RZWP3K	10,0	Daerah	25.000,0	250.000,0	17,0	24,0	34,0	625.000,0	1.562.500,0	3.906.250,0
01.UBA.013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	17	24	34	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.013.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	10,0	Daerah	50.000,0	500.000,0	17,0	24,0	34,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	17	24	34	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.014.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam meningkatkan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	10,0	Daerah	50.000,0	500.000,0	17,0	24,0	34,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	17	24	34	1.250,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.015.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam meningkatkan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air Minum dan sanitasi layak dan aman	10,0	Daerah	50.000,0	500.000,0	17,0	24,0	34,0	1.250,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	17	Daerah (Prov/Kab/Kota)		5.000.000,0	22	28	34	12.500.000,0	31.250.000,0	78.125.000,0
01.UBA.016.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi	17,0	Provinsi	294.117,6	5.000.000,0	22,0	28,0	34,0	12.500.000,0	31.250.000,0	78.125.000,0
01.UBA.017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	17	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.500.000,0	22	28	34	6.250.000,0	15.625.000,0	39.062.500,0
01.UBA.017.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi	17,0	Provinsi	147.058,8	2.500.000,0	22,0	28,0	34,0	6.250.000,0	15.625.000,0	39.062.500,0
01.UBA.018	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	49	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.400.000,0	48	48	48	3.500.000,0	8.750.000,0	21.875.000,0
01.UBA.018.051	Asistensi dan supervisi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman	49,0	Provinsi	28.571,4	1.400.000,0	48,0	48,0	48,0	3.500.000,0	8.750.000,0	21.875.000,0
01.UBA.019	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.500.000,0	17	24	34	3.750.000,0	9.375.000,0	23.437.500,0
01.UBA.019.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi program pengelolaan Sumber Daya Air di daerah	10,0	Provinsi	150.000,0	1.500.000,0	17,0	24,0	34,0	3.750.000,0	9.375.000,0	23.437.500,0
01.UBA.020	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)		1.500.000,0	17	24	34	3.750.000,0	9.375.000,0	23.437.500,0
01.UBA.020.051	Asistensi dan supervisi pusat dan daerah dalam rangka integrasi rencana aksi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan untuk mengatasi resiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	10,0	Provinsi	150.000,0	1.500.000,0	17,0	24,0	34,0	3.750.000,0	9.375.000,0	23.437.500,0
01.UBA.021	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	7	Daerah (Prov/Kab/Kota)		400.000,0	7	7	7	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.UBA.021.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pengimplementasian kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Inpres No.9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	7,0	Daerah	57.142,9	400.000,0	7,0	7,0	7,0	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.UBA.022	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M	7	Daerah (Prov/Kab/Kota)		400.000,0	7	7	7	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.UBA.022.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M	7,0	Daerah	57.142,9	400.000,0	7,0	7,0	7,0	1.000.000,0	2.500.000,0	6.250.000,0
01.UBA.023	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak	50	Daerah (Prov/Kab/Kota)		300.000,0	55	60	70	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.UBA.023.051	Asistensi dan Supervisi dalam pengintegrasian rencana aksi untuk mendukung program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak di daerah	50,0	Daerah	6.000,0	300.000,0	55,0	60,0	70,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
01.UBA.024	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	22	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	24	28	34	1.250,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.024.051	Integrasi dan penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	22,0	Daerah	22.727,3	500.000,0	24,0	28,0	34,0	1.250,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	22	26	32	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.025.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam peningkatan koordinasi pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	20,0	Daerah	25.000,0	500.000,0	22,0	26,0	32,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.026	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	22	Daerah (Prov/Kab/Kota)		500.000,0	24	28	34	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.026.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	22,0	Daerah	22.727,3	500.000,0	24,0	28,0	34,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
01.UBA.027	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)		600.000,0	24	30	34	1.500.000,0	3.750.000,0	9.375.000,0
01.UBA.027.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	18,0	Daerah	33.333,3	600.000,0	24,0	30,0	34,0	1.500.000,0	3.750.000,0	9.375.000,0
01.UBA.028	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		750.000,0	34	34	34	1.875.000,0	4.687.500,0	11.718.750,0
01.UBA.028.051	Asistensi dan evaluasi dalam penetapan upah minimum provinsi	34,0	Provinsi	22.058,8	750.000,0	34,0	34,0	34,0	1.875.000,0	4.687.500,0	11.718.750,0
01.UBA.029	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	54.75	Daerah (Prov/Kab/Kota)		300.000,0	56.5	58.5	60	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
01.UBA.029.051	Asistensi dan supervisi dalam peningkatan indeks gemar membaca di daerah	54,8	Nilai	5.479,5	300.000,0	56,5	58,5	60,0	750.000,0	1.875.000,0	4.687.500,0
Total					125.984.606,0	-	-	-	280.426.515,0	403.573.213,0	689.884.625,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah		45.953.000,0	0,0	68.531.606,0	0,0	11.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125.984.606,0
01.AAG	Peraturan Menteri		350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
01.AAG.001	Revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.AAG.001.051	Penyusunan Permendagri tentang Revisi Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.AAG.002	Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.AAG.002.051	Penyusunan Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.735.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.735.000,0
01.AFA.001	NSPK dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disinkronkan		1.735.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.735.000,0
01.AFA.001.051	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang	Utama	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.AFA.001.052	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.AFA.001.053	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pertanian dan Pangan	Utama	120.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
01.AFA.001.054	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kehutanan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001.055	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Lingkungan Hidup	Utama	175.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.000,0
01.AFA.001.056	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kesehatan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001.057	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kelautan dan Perikanan	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.AFA.001.058	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Perhubungan	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.AFA.001.059	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.AFA.001.060	dentifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pendidikan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001.061	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.AFA.001.062	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001.063	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.AFA.001.064	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		190.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.000,0
01.FAC.001	SDM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah IV yang ditingkatkan kapasitasnya		190.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.000,0
01.FAC.001.051	Bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan rasio SDM pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah IV	Utama	190.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.000,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750.000,0
01.FAE.001	Rekomendasi Hasil Pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FAE.001.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan pengendalian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FAE.002	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ranperda tentang RZWP3K		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FAE.002.051	Evaluasi Ranperda tentang RZWP3K daerah	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FAE.003	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Perda tentang RZWP3K dalam Pengendalian Rencana Tata Ruang		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FAE.003.051	Penyusunan Instrumen Pengendalian Pelaksanaan Perda tentang RZWP3K dalam Pengendalian Rencana Tata Ruang	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		8.810.000,0	0,0	68.531.606,0	0,0	11.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88.841.606,0
01.FBA.001	Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		3.025.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.025.000,0
01.FBA.001.051	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.001.052	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Utama	385.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385.000,0
01.FBA.001.053	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan Pangan	Utama	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0
01.FBA.001.054	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kehutanan	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.001.055	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.001.056	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.001.057	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Sosial dan Budaya	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.001.058	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.001.059	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perindustrian dan Perdagangan	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.FBA.001.060	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.FBA.001.061	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum	Utama	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
01.FBA.001.062	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Permukiman	Utama	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
01.FBA.001.063	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.FBA.001.064	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Perhubungan	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.001.065	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.FBA.001.066	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	Utama	130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.FBA.001.067	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.FBA.001.068	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Utama	130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0
01.FBA.001.069	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FBA.001.070	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan.	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.FBA.002	Fasilitasi Penyusunan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dalam Rangka Pemindahan Ibukota		70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
01.FBA.002.051	Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi	Utama	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
01.FBA.003	Fasilitasi Pencapaian Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.003.051	Asistensi dan supervisi terhadap pelaksanaan pengendalian pencapaian target rencana umum energi daerah	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.004	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Reforma Agraria		70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
01.FBA.004.051	Penyelenggaraan Pelaksanaan penataan akses dalam rangka pencapaian reforma agraria di daerah	Utama	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
01.FBA.005	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Penghapusan Merkuri Bidang Energi Pertambangan Emas Skala Kecil		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.005.051	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah terkait Pertambangan Rakyat berizin	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.006	Fasilitasi Penguatan Ketahanan Pangan Daerah		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.006.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan penguatan ketahanan pangan	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.007	Fasilitasi Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat		2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.FBA.007.051	Asistensi dan supervisi pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.FBA.007.052	Implementasi pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat	Utama	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
01.FBA.008	Fasilitasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial Daerah		320.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320.000,0
01.FBA.008.051	Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial di daerah	Utama	320.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320.000,0
01.FBA.009	Fasilitasi Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD		175.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.000,0
01.FBA.009.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	Utama	175.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175.000,0
01.FBA.010	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan Daerah		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.010.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pengendalian persampahan di daerah	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.011	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Metrologi Legal Daerah		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.011.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan pelaksanaan layanan metrologi legal di daerah sesuai dengan peraturan perundangan	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.012	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.012.051	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.013	Fasilitasi Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha Daerah		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.013.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam fasilitasi pembentukan peran satgas kemudahan berusaha	Utama	75.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0
01.FBA.013.052	Koordinasi dengan K/L dalam rangka fasilitasi pembentukan satgas kemudahan berusaha	Utama	75.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0
01.FBA.014	Fasilitasi Penerapan Penyederhanaan Regulasi dan Kebijakan terkait Penanaman Modal dan Investasi Daerah		600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.FBA.014.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan penyedehanaan regulasi dan kebijakan terkait dengan penanaman modal	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.014.052	Asistensi dan supervisi daerah yang menyederhanakan perizinan dan pelayanan kemudahan berinvestasi	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.015	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.015.051	Supervisi Pelaksanaan Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.FBA.017	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.017.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.018	Fasilitasi Promosi dan Kemudahan Berusaha UMKM Daerah		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.018.051	Asistensi dan supervisi daerah sebagai pilot project dalam melaksanakan promosi dan kemudahan berusaha bagi UMKM	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.019	Fasilitasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.019.051	Asistensi dan supervisi dalam rangka penyusunan dan penerapan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD)	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.FBA.020	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan daerah		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FBA.020.051	Asistensi dan supervisi penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FBA.022	Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Rencana Induk Transportasi		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.FBA.022.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam melakukan pengendalian RTR	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.FBA.023	Fasilitasi Kampung Nelayan Sejahtera		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.023.051	Pengumpulan Data terkait Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di daerah	Utama	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0
01.FBA.023.052	Analisis dan Penyusunan Model Kampung Nelayan Sejahtera	Utama	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
01.FBA.024	Fasilitasi Penguatan Pokja Daerah yang telah Menyusun GDPK 5 Pilar		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FBA.024.051	Asistensi dan Supervisi dalam penguatan pokja daerah GDPK 5 Pilar	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.FBA.025	Fasilitasi Penerapan Kebijakan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Daerah		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.025.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.FBA.026	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Transmigrasi		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.026.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menyelesaikan permasalahan di Kawasan Transmigrasi	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.027	Fasilitasi Penerapan SDI Pembangunan Olahraga Nasional		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.FBA.027.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan Sport Development Index (SDI) untuk mendukung pembangunan olahraga secara nasional	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.FBA.028	Fasilitasi penyelenggaraan penerapan kearsipan		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.028.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam penyelenggaraan penerapan kearsipan	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.029	Fasilitasi Implementasi Lahan Pertanian Beririgasi yang Terintegrasi (IPDMIP)		0,0	0,0	24.627.212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.627.212,0
01.FBA.029.051	Asistensi dan supervisi pengelolaan lahan pertanian pangan beririgasi secara partisipatif	Utama	0,0	0,0	24.627.212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.627.212,0
01.FBA.030	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Resiko Banjir di Daerah Terpilih pada Area Cekungan Tangkapan Sungai (FMSRB)		0,0	0,0	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0
01.FBA.030.051	Asistensi dan supervisi daerah terpilih dalam perencanaan dan pengendalian resiko banjir pada area cekungan tangkapan sungai	Utama	0,0	0,0	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0
01.FBA.031	Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)		0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.FBA.031.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan dan melaksanakan pengelolaan sampah berbasis pelestarian lingkungan hidup	Utama	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.031.052	Pengelolaan manajemen persampahan terpadu di daerah terpilih yang partisipatif	Utama	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.032	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah (INEY)		0,0	0,0	0,0	0,0	11.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000.000,0
01.FBA.032.051	Asistensi dan supervisi kinerja kab/kota dalam implementasi/konvergensi program penanganan penurunan stunting	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	10.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.200.000,0
01.FBA.032.052	Bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penilaian kinerja	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.FBA.033	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategis (SIMURP)		0,0	0,0	20.334.394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.334.394,0
01.FBA.033.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya air	Pendukung	0,0	0,0	18.334.394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.334.394,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.FBA.033.052	Asistensi dan supervisi dalam manajemen data dan informasi sumber daya air/irigasi di daerah	Utama	0,0	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.FBA.034	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Terjangkau Bagi Masyarakat Berbasis Kelembagaan Daerah (NAHP)		0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.034.051	Asistensi dan supervisi daerah di dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berbasis kelembagaan	Utama	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.035	Fasilitasi Penyediaan Air Minum Perkotaan Kawasan Permukiman (NUSWP)		0,0	0,0	9.070.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.070.000,0
01.FBA.035.051	Asistensi dan supervisi daerah di dalam Penyediaan Air Minum perkotaan di kawasan permukiman (NUSWP)	Utama	0,0	0,0	9.070.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.070.000,0
01.FBA.036	Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)		0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.FBA.036.051	Asistensi dan supervisi perencanaan terpadu di perkotaan	Utama	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.036.052	Asistensi dan Supervisi Perencanaan Berbasis Potensi Daerah melalui SIPD dan Dukungan Implementasi NUDP	Utama	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.037	Fasilitasi Penyusunan RAD AMPL		0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.FBA.037.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam Penyusunan RAD AMPL dan memiliki peningkatan APBD terkait sanitasi dan air minum (Pamsimas)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		34.118.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.118.000,0
01.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sanitasi		1.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.870.000,0
01.UBA.001.051	Asistensi dan supervisi dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Sanitasi	Utama	1.570.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.570.000,0
01.UBA.001.052	Monitoring dan evaluasi Integrasi dan penerapan SPM bidang sanitasi di daerah	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.UBA.002	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Perumahan		1.870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.870.000,0
01.UBA.002.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang air minum dan perumahan	Utama	1.358.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.358.000,0
01.UBA.002.052	Monitoring dan evaluasi Integrasi dan penerapan SPM bidang Air Minum dan Perumahan di daerah	Utama	512.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512.000,0
01.UBA.003	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan		1.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.860.000,0
01.UBA.003.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Kesehatan	Utama	1.210.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.210.000,0
01.UBA.003.052	Monitoring dan evaluasi Integrasi dan penerapan SPM bidang Kesehatan di daerah	Utama	650.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650.000,0
01.UBA.004	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial		1.880.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.880.000,0
01.UBA.004.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Sosial	Utama	1.380.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380.000,0
01.UBA.004.052	Monitoring dan evaluasi Integrasi dan penerapan SPM bidang Sosial di daerah	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.005	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas		1.860.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.860.000,0
01.UBA.005.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Trantibumlinmas	Utama	1.360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360.000,0
01.UBA.005.052	Monitoring dan evaluasi Integrasi dan penerapan SPM bidang Trantibumlinmas di daerah	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.006	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan		1.528.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.528.000,0
01.UBA.006.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam mengintegrasikan dan menerapkan SPM bidang Pendidikan	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.UBA.006.052	Monitoring dan evaluasi Integrasi dan penerapan SPM bidang bidang Pendidikan di daerah	Utama	528.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528.000,0
01.UBA.007	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RTR di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)		3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0
01.UBA.007.051	Asistensi dan Supervisi Daerah dalam Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/KEK)	Utama	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.UBA.007.052	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penataan Ruang dalam mendukung Pengelolaan Kawasan Khusus	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.UBA.008	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.008.051	Asistensi dan Supervisi Penyusunan dan Penerapan Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.009	Daerah yang mendapatkan rekomendasi raperda tentang RDTR di lokasi OSS		800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.UBA.009.051	Asistensi Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota untuk mendukung OSS	Utama	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.UBA.010	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.UBA.010.051	Asistensi dan supervisi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.UBA.010.052	Koordinasi penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	Utama	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.UBA.010.053	Monev atas penyusunan dan penerapan rencana aksi destinasi wisata	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.UBA.011	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.UBA.011.051	Asistensi dan supervisi Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.UBA.011.052	Asistensi dan supervisi daerah yang melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
01.UBA.012	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.012.051	Fasilitasi dan sinkronisasi penyesuaian dokumen perencanaan daerah dengan Perda RZWP3K	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.UBA.012.052	Koordinasi lintas sektor pusat tindak lanjut sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan PERDA RZWP3K	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
01.UBA.013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.013.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.014.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam meningkatkan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.015.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam meningkatkan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air Minum dan sanitasi layak dan aman	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)		5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.UBA.016.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi	Utama	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.UBA.017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)		2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0
01.UBA.017.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi	Utama	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0
01.UBA.018	Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		1.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400.000,0
01.UBA.018.051	Asistensi dan supervisi Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Utama	1.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400.000,0
01.UBA.019	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.UBA.019.051	Asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi program pengelolaan Sumber Daya Air di daerah	Utama	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.UBA.020	Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.UBA.020.051	Asistensi dan supervisi pusat dan daerah dalam rangka integrasi rencana aksi penanggulangan banjir dalam dokumen perencanaan untuk mengatasi resiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Utama	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.UBA.021	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.UBA.021.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pengimplementasian kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.UBA.022	Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.UBA.022.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.UBA.023	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.UBA.023.051	Asistensi dan Supervisi dalam pengintegrasian rencana aksi untuk mendukung program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak di daerah	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.UBA.024	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.024.051	Integrasi dan penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.025.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam peningkatan koordinasi pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.026	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.026.051	Asistensi dan Supervisi daerah dalam melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.UBA.027	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan		600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.UBA.027.051	Asistensi dan supervisi daerah dalam menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Utama	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.UBA.028	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi		750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750.000,0
01.UBA.028.051	Asistensi dan evaluasi dalam penetapan upah minimum provinsi	Utama	750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750.000,0
01.UBA.029	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.UBA.029.051	Asistensi dan supervisi dalam peningkatan Indeks gemar membaca di daerah	Utama	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Total			45.953.000,0	0,0	68.531.606,0	0,0	11.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125.984.606,0

Jakarta, 19 Oktober 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 196110301981022001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
05 - Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
07 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang efektif dan efisien
10 - Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
11 - Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
	Total	0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional		4.671.647,0
01.01	Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri	Level 3 (80%)	
01.02	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (80%)	
02	Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas		608.737.830,0
02.01	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	30	
02.02	Persentase lulusan dengan Predikat Cumlaude	19% (DIV&S1), 21% (S-2), 21% (S-3), 11% (Pr)	
02.03	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	3,2	
02.04	Akreditasi Institusi	A	
02.05	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B	9	
02.06	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional/ Internasional Terakreditasi	36	
02.07	Penerapan Smart Campus di lingkungan IPDN	50	
02.08	Jumlah MoU kemitraan strategis yang diimplementasikan (PKS)	12	
03	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah		10.584.507,0
03.01	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Baik)	
03.02	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 75 (B)	
04	Meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri		9.674.088,0
04.01	Indeks pengawasan Internal	Nilai 85 (Baik)	
04.02	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 81 (Baik)	
05	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri		760.759.902,0
05.01	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I	100%	
05.02	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 14	
05.03	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah	Nilai14	
05.04	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Otonomi Daerah	Nilai 11	
05.05	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangda	Nilai 13	
05.06	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 15	
05.07	Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 12	
05.08	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Polpum	Nilai 14	
05.09	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 12	
05.10	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Nilai 12	
05.11	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspektorat Jenderal	Nilai 5	
05.12	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah	Nilai 10	
05.13	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Nilai 10	
05.14	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otda	Nilai 10	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
05.15	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Nilai 10	
05.16	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Polpum	Nilai 10	
05.17	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Nilai 9	
05.18	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai 13	
05.19	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahahan Desa	Nilai 12	
05.20	Nilai Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Dukcapil	Nilai 13	
05.21	Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Dukcapil	Nilai 10	
06	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		453.493.419,0
06.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 87,01	
06.02	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	158 Unit Kerja	
06.03	Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri	4,30 (baik)	
06.04	Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	WTP	
06.05	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	BB	
06.06	Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	Nilai 3,5	
06.07	Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri	Nilai 90,5	
06.08	Persentase Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kemendagri menuju Birokrasi kelas dunia	64%	
06.09	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan	45 Rancangan PerUU	
06.10	Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Nilai 75	
06.11	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)	2	
	Total		1.847.921.393,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kementerian Dalam Negeri	762.467.042,0
01.01	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Keuangan Daerah	
01.02	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	
01.03	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan	
01.04	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	
01.05	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Pembangunan Daerah	
01.06	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Otonomi Daerah	
01.07	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
01.08	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Badan Pengembangan SDM	
01.09	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Badan Litbang	
01.10	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	
02	Layanan Dukungan Manajemen Kementerian	1.059.909.249,0
02.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	
02.02	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	
02.03	Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri	
02.04	Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	
02.05	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	
02.06	Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	
02.07	Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri	
02.08	Persentase Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kemendagri	
02.09	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan	
02.10	Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	
02.11	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)	
02.12	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	
02.13	Persentase lulusan dengan Predikat Cumlaude	
03	kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional	5.286.507,0
03.01	kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
03.02	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	
04	kualitas pengawasan pemerintahan daerah, internal dan kapasitas Inspektorat Daerah	20.258.595,0
04.01	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	
04.02	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	
04.03	Indeks pengawasan Internal	
04.04	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	
Total		1.847.921.393,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2022	2023	2024
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0	12.000.000,0	30.000.000,0	75.000.000,0
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70.382.229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.382.229,0	175.946.573,0	436.778.932,0	1.099.833.435,0
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0	5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1.324.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324.400,0	2.750.000,0	5.625.000,0	10.812.500,0
Total		80.328.629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.328.629,0	200.251.573,0	496.191.432,0	1.245.364.685,0

Jakarta, 19 Oktober 2020
Direktur Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. UNIT ORGANISASI : 06 - Ditjen Bina Pembangunan Daerah
3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG :
   05 - Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
   07 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang efektif dan efisien
   10 - Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
   11 - Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas
4. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
05	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri		78.006.629,0
05.05	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangda	Nilai 13	
05.15	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Nilai 10	
Total			78.006.629,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kementerian Dalam Negeri	80.328.629,0
01.05	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Pembangunan Daerah	
Total		80.328.629,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2022	2023	2024
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0	12.000.000,0	30.000.000,0	75.000.000,0
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	70.382.229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.382.229,0	175.946.573,0	436.778.932,0	1.099.833.435,0
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0	5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	1.324.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324.400,0	2.750.000,0	5.625.000,0	10.812.500,0
Total		80.328.629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.328.629,0	200.251.573,0	496.191.432,0	1.245.364.685,0

Jakarta, 03 November 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional
02 - Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas
03 - Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah
04 - Meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri
05 - Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri
06 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4. KEGIATAN : 6111 - Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
06	Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tugas khusus lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		4.800.000,0
06.01	Jumlah daerah yang melaksanakan dan melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	34	
06.02	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	34	
	Total		4.800.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06	*Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tugas khusus lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah*										4.800.000,0
06.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										4.800.000,0
06.FBA.001	Pelaksanaaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)								000 - Bukan Tematik		2.750.000,0
	051 - Pelaksanaan Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM)										1.750.000,0
		Pusat	Pusat								1.750.000,0
	052 - Penguatan Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi dalam pelaporan pelaksanaan penerapan SPM tingkat Kabupaten/Kota										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
06.FBA.002	Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)								000 - Bukan Tematik		2.050.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Daerah yang Melaporkan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)										2.050.000,0
		Pusat	Pusat								2.050.000,0
Total											4.800.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06	Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tugas khusus lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah				4.800.000,0				12.000.000,0	30.000.000,0	75.000.000,0
06.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	68	Daerah (Prov/Kab/Kota)		4.800.000,0				12.000.000,0	30.000.000,0	75.000.000,0
06.FBA.001	Pelaksanaaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.750.000,0	34	34	34	6.875.000,0	17.187.500,0	42.968.750,0
06.FBA.001.051	Pelaksanaan Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM)	34,0	Provinsi	51.470,6	1.750.000,0	34,0	34,0	34,0	4.375.000,0	10.937.500,0	27.343.750,0
06.FBA.001.052	Penguatan Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi dalam pelaporan pelaksanaan penerapan SPM tingkat Kabupaten/Kota	34,0	Provinsi	29.411,8	1.000.000,0	34,0	34,0	34,0	2.500.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
06.FBA.002	Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)		2.050.000,0	34	34	34	5.125.000,0	12.812.500,0	32.031.250,0
06.FBA.002.051	Daerah yang Melaporkan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	34,0	Provinsi	60.294,1	2.050.000,0	34,0	34,0	34,0	5.125.000,0	12.812.500,0	32.031.250,0
Total					4.800.000,0	-	-	-	12.000.000,0	30.000.000,0	75.000.000,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
06	Meningkatnya kualitas layanan pelaksanaan tugas khusus lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0
06.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0
06.FBA.001	Pelaksanaaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		2.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.750.000,0
06.FBA.001.051	Pelaksanaan Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Utama	1.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750.000,0
06.FBA.001.052	Penguatan Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi dalam pelaporan pelaksanaan penerapan SPM tingkat Kabupaten/Kota	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
06.FBA.002	Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)		2.050.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
06.FBA.002.051	Daerah yang Melaporkan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Utama	2.050.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050.000,0
Total			4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0

Jakarta, 19 Oktober 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional
02 - Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas
03 - Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah
04 - Meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri
05 - Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri
06 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4. KEGIATAN : 6112 - Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		1.500.000,0
06.01	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun	100	
Total			1.500.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06	*Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah*										1.500.000,0
06.EAG	Layanan Hukum										1.500.000,0
06.EAG.001	Layanan Hukum								000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	051 - Pelayanan hukum dan kepatuhan internal										1.500.000,0
		Pusat	Pusat								1.500.000,0
Total											1.500.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah				1.500.000,0				3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0
06.EAG	Layanan Hukum	1	Layanan		1.500.000,0				3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0
06.EAG.001	Layanan Hukum	1	Layanan		1.500.000,0	1	1	1	3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0
06.EAG.001.051	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	1,0	Layanan	1.500.000,0	1.500.000,0	1,0	1,0	1,0	3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0
Total					1.500.000,0	-	-	-	3.750.000,0	9.275.000,0	23.437.500,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
06.EAG	Layanan Hukum		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
06.EAG.001	Layanan Hukum		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
06.EAG.001.051	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	Pendukung	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
Total			1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0

Jakarta, 19 Oktober 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional
02 - Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas
03 - Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah
04 - Meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri
05 - Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri
06 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4. KEGIATAN : 6113 - Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		70.382.229,0
06.01	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100	
06.02	Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100	
06.03	Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	
06.04	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Bangda	96	
06.05	Rating Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Bangda	3.6	
06.06	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Bangda	100	
06.07	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Bangda	100	
06.08	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	100	
06.09	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu	100	
06.10	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100	
	Total		70.382.229,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06	*Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah*										70.382.229,0
06.EAA	Layanan Perkantoran										53.141.629,0
06.EAA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		53.141.629,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										41.961.040,0
		Pusat	Pusat								41.961.040,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										11.180.589,0
		Pusat	Pusat								11.180.589,0
06.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal										4.403.060,0
06.EAB.001	Layanan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal								000 - Bukan Tematik		59.582,0
	051 - Persiapan										4.014,0
		Pusat	Pusat								4.014,0
	052 - Pelaksanaan										55.168,0
		Pusat	Pusat								55.168,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Pelaporan										400,0
		Pusat	Pusat								400,0
06.EAB.002	Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal								000 - Bukan Tematik		17.978,0
	051 - Persiapan										390,0
		Pusat	Pusat								390,0
	052 - Pelaksanaan										17.388,0
		Pusat	Pusat								17.388,0
	053 - Pelaporan										200,0
		Pusat	Pusat								200,0
06.EAB.003	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Penyusunan rencana Program dan anggaran										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
06.EAB.004	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan								000 - Bukan Tematik		3.325.500,0
	051 - Pengelolaan Keuangan										1.825.500,0
		Pusat	Pusat								1.825.500,0
	052 - Pengelolaan Perbendaharaan										1.500.000,0
		Pusat	Pusat								1.500.000,0
06.EAC	Layanan Umum										8.398.040,0
06.EAC.001	Layanan Umum dan Perlengkapan								000 - Bukan Tematik		1.700.000,0
	051 - Pengelolaan pelayanan umum dan perlengkapan										1.700.000,0
		Pusat	Pusat								1.700.000,0
06.EAC.002	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Eselon II								000 - Bukan Tematik		2.500.000,0
	051 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
	052 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
	053 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
	054 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV										500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								500.000,0
	055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Informasi dan Pembangunan Daerah										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
06.EAC.003	Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah								000 - Bukan Tematik		4.198.040,0
	051 - Dukungan Penyusunan dan Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Pembinaan Pembangunan Daerah										4.198.040,0
		Pusat	Pusat								4.198.040,0
06.EAD	Layanan Sarana Internal										1.334.500,0
06.EAD.001	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		1.334.500,0
	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi										864.500,0
		Pusat	Pusat								864.500,0
	052 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran										470.000,0
		Pusat	Pusat								470.000,0
06.EAE	Layanan Prasarana Internal										1.700.000,0
06.EAE.001	Layanan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik		1.700.000,0
	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan										1.700.000,0
		Pusat	Pusat								1.700.000,0
06.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler										700.000,0
06.EAI.001	Layanan Humas dan Protokol								000 - Bukan Tematik		700.000,0
	051 - Pelayanan Humas dan Protokol										700.000,0
		Pusat	Pusat								700.000,0
06.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal										705.000,0
06.EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		705.000,0
	051 - Pelaksanaan pemantauan evaluasi										705.000,0
		Pusat	Pusat								705.000,0
Total											70.382.229,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah				70.382.229,0				175.946.573,0	436.778.932,0	1.099.833.435,0
06.EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan		53.141.629,0				132.854.073,0	332.135.181,0	830.337.953,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06.EAA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		53.141.629,0	1	1	1	132.854.073,0	332.135.181,0	830.337.953,0
06.EAA.994.001	Gaji dan Tunjangan	1,0	Layanan	41.961.040,0	41.961.040,0	1,0	1,0	1,0	104.902.600,0	262.256.500,0	655.641.250,0
06.EAA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	11.180.589,0	11.180.589,0	1,0	1,0	1,0	27.951.473,0	69.878.681,0	174.696.703,0
06.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4	Layanan		4.403.060,0				10.998.650,0	27.444.126,0	68.619.294,0
06.EAB.001	Layanan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	1	Layanan		59.582,0	1	1	1	139.955,0	372.388,0	930.969,0
06.EAB.001.051	Persiapan	1,0	Dokumen	4.014,0	4.014,0	1,0	1,0	1,0	1.035,0	25.088,0	62.719,0
06.EAB.001.052	Pelaksanaan	1,0	Dokumen	55.168,0	55.168,0	1,0	1,0	1,0	137.920,0	344.800,0	862.000,0
06.EAB.001.053	Pelaporan	1,0	Dokumen	400,0	400,0	1,0	1,0	1,0	1.000,0	2.500,0	6.250,0
06.EAB.002	Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1	Layanan		17.978,0	1	1	1	44.945,0	112.363,0	280.887,0
06.EAB.002.051	Persiapan	1,0	Dokumen	390,0	390,0	1,0	1,0	1,0	975,0	2.438,0	6.094,0
06.EAB.002.052	Pelaksanaan	1,0	Dokumen	17.388,0	17.388,0	1,0	1,0	1,0	43.470,0	108.675,0	271.668,0
06.EAB.002.053	Pelaporan	1,0	Dokumen	200,0	200,0	1,0	1,0	1,0	500,0	1.250,0	3.125,0
06.EAB.003	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1	Layanan		1.000.000,0	1	1	1	2.500.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
06.EAB.003.051	Penyusunan rencana Program dan anggaran	1,0	Layanan	1.000.000,0	1.000.000,0	1,0	1,0	1,0	2.500.000,0	6.250.000,0	15.625.000,0
06.EAB.004	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1	Layanan		3.325.500,0	1	1	1	8.313.750,0	20.709.375,0	51.782.438,0
06.EAB.004.051	Pengelolaan Keuangan	1,0	Layanan	1.825.500,0	1.825.500,0	1,0	1,0	1,0	4.563.750,0	11.409.375,0	28.532.438,0
06.EAB.004.052	Pengelolaan Perbendaharaan	1,0	Layanan	1.500.000,0	1.500.000,0	1,0	1,0	1,0	3.750.000,0	9.300.000,0	23.250.000,0
06.EAC	Layanan Umum	7	Layanan		8.398.040,0				20.995.100,0	49.452.750,0	130.906.875,0
06.EAC.001	Layanan Umum dan Perlengkapan	1	Layanan		1.700.000,0	1	1	1	4.250.000,0	10.625.000,0	26.562.500,0
06.EAC.001.051	Pengelolaan pelayanan umum dan perlengkapan	1,0	Layanan	1.700.000,0	1.700.000,0	1,0	1,0	1,0	4.250.000,0	10.625.000,0	26.562.500,0
06.EAC.002	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Eselon II	5	Layanan		2.500.000,0	5	5	5	6.250.000,0	15.715.000,0	38.750.000,0
06.EAC.002.051	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.250.000,0	3.215.000,0	7.750.000,0
06.EAC.002.052	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.750.000,0
06.EAC.002.053	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.750.000,0
06.EAC.002.054	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.750.000,0
06.EAC.002.055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Informasi dan Pembangunan Daerah	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.750.000,0
06.EAC.003	Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah	1	Layanan		4.198.040,0	1	1	1	10.495.100,0	23.112.750,0	65.594.375,0
06.EAC.003.051	Dukungan Penyusunan dan Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Pembinaan Pembangunan Daerah	1,0	Layanan	4.198.040,0	4.198.040,0	1,0	1,0	1,0	10.495.100,0	23.112.750,0	65.594.375,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06.EAD	Layanan Sarana Internal	68	unit		1.334.500,0				3.336.250,0	8.340.625,0	20.750.563,0
06.EAD.001	Layanan Sarana Internal	68	unit		1.334.500,0	68	68	68	3.336.250,0	8.340.625,0	20.750.563,0
06.EAD.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	58,0	Unit	14.905,2	864.500,0	58,0	58,0	58,0	2.161.250,0	5.403.125,0	13.507.813,0
06.EAD.001.052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	10,0	Unit	47.000,0	470.000,0	10,0	10,0	10,0	1.175.000,0	2.937.500,0	7.242.750,0
06.EAE	Layanan Prasarana Internal	6	unit		1.700.000,0				4.250.000,0	10.625.000,0	26.562.500,0
06.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	6	unit		1.700.000,0	6	6	6	4.250.000,0	10.625.000,0	26.562.500,0
06.EAE.001.051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	6,0	Unit	283.333,3	1.700.000,0	6,0	6,0	6,0	4.250.000,0	10.625.000,0	26.562.500,0
06.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan		700.000,0				1.750.000,0	4.375.000,0	10.937.500,0
06.EAI.001	Layanan Humas dan Protokol	1	Layanan		700.000,0	1	1	1	1.750.000,0	4.375.000,0	10.937.500,0
06.EAI.001.051	Pelayanan Humas dan Protokol	1,0	Layanan	700.000,0	700.000,0	1,0	1,0	1,0	1.750.000,0	4.375.000,0	10.937.500,0
06.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan		705.000,0				1.762.500,0	4.406.250,0	11.718.750,0
06.EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi	1	Laporan		705.000,0	1	1	1	1.762.500,0	4.406.250,0	11.718.750,0
06.EAL.001.051	Pelaksanaan pemantauan evaluasi	1,0	Laporan	705.000,0	705.000,0	1,0	1,0	1,0	1.762.500,0	4.406.250,0	11.718.750,0
Total					70.382.229,0	-	-	-	175.946.573,0	436.778.932,0	1.099.833.435,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		70.382.229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.382.229,0
06.EAA	Layanan Perkantoran		53.141.629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53.141.629,0
06.EAA.994	Layanan Perkantoran		53.141.629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53.141.629,0
06.EAA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	41.961.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.961.040,0
06.EAA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	11.180.589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.180.589,0
06.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		4.403.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.403.060,0
06.EAB.001	Layanan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal		59.582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.582,0
06.EAB.001.051	Persiapan	Pendukung	4.014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.014,0
06.EAB.001.052	Pelaksanaan	Pendukung	55.168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55.168,0
06.EAB.001.053	Pelaporan	Pendukung	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
06.EAB.002	Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal		17.978,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.978,0
06.EAB.002.051	Persiapan	Pendukung	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
06.EAB.002.052	Pelaksanaan	Pendukung	17.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.388,0
06.EAB.002.053	Pelaporan	Pendukung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
06.EAB.003	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
06.EAB.003.051	Penyusunan rencana Program dan anggaran	Pendukung	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
06.EAB.004	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		3.325.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.325.500,0
06.EAB.004.051	Pengelolaan Keuangan	Pendukung	1.825.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.825.500,0
06.EAB.004.052	Pengelolaan Perbendaharaan	Pendukung	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
06.EAC	Layanan Umum		8.398.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.398.040,0
06.EAC.001	Layanan Umum dan Perlengkapan		1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
06.EAC.001.051	Pengelolaan pelayanan umum dan perlengkapan	Pendukung	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
06.EAC.002	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja Eselon II		2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
06.EAC.002.051	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06.EAC.002.052	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06.EAC.002.053	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06.EAC.002.054	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06.EAC.002.055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Informasi dan Pembangunan Daerah	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06.EAC.003	Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah		4.198.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.198.040,0
06.EAC.003.051	Dukungan Penyusunan dan Penyelenggaraan Kegiatan Strategis Pembinaan Pembangunan Daerah	Pendukung	4.198.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.198.040,0
06.EAD	Layanan Sarana Internal		1.334.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.334.500,0
06.EAD.001	Layanan Sarana Internal		1.334.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.334.500,0
06.EAD.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pendukung	864.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864.500,0
06.EAD.001.052	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pendukung	470.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470.000,0
06.EAE	Layanan Prasarana Internal		1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
06.EAE.001	Layanan Prasarana Internal		1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
06.EAE.001.051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Pendukung	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
06.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
06.EAI.001	Layanan Humas dan Protokol		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
06.EAI.001.051	Pelayanan Humas dan Protokol	Pendukung	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
06.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		705.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705.000,0
06.EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi		705.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705.000,0
06.EAL.001.051	Pelaksanaan pemantauan evaluasi	Pendukung	705.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705.000,0
Total			70.382.229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.382.229,0

Jakarta, 19 Oktober 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional
02 - Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas
03 - Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah
04 - Meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri
05 - Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri
06 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4. KEGIATAN : 6115 - Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		1.324.400,0
06.01	Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	13	
06.02	Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	12	
Total			1.324.400,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06	*Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah*										1.324.400,0
06.EAF	Layanan SDM										824.400,0
06.EAF.001	Layanan SDM								000 - Bukan Tematik		824.400,0
	051 - Pengelolaan Kepegawaian										824.400,0
		Pusat	Pusat								824.400,0
06.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										500.000,0
06.EAH.001	Layanan Organisasi dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi								000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
Total											1.324.400,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah				1.324.400,0				2.750.000,0	5.625.000,0	10.812.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06.EAF	Layanan SDM	210	orang		824.400,0				1.500.000,0	2.500.000,0	3.000.000,0
06.EAF.001	Layanan SDM	210	orang		824.400,0	220	230	240	1.500.000,0	2.500.000,0	3.000.000,0
06.EAF.001.051	Pengelolaan Kepegawaian	210,0	Orang	3.925,7	824.400,0	220,0	230,0	240,0	1.500.000,0	2.500.000,0	3.000.000,0
06.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		500.000,0				1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
06.EAH.001	Layanan Organisasi dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	1	Layanan		500.000,0	1	1	1	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
06.EAH.001.051	Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	1,0	Layanan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	1.250.000,0	3.125.000,0	7.812.500,0
Total					1.324.400,0	-	-	-	2.750.000,0	5.625.000,0	10.812.500,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		1.324.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324.400,0
06.EAF	Layanan SDM		824.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824.400,0
06.EAF.001	Layanan SDM		824.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824.400,0
06.EAF.001.051	Pengelolaan Kepegawaian	Pendukung	824.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824.400,0
06.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06.EAH.001	Layanan Organisasi dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
06.EAH.001.051	Pelayanan Organisasi dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
Total			1.324.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.324.400,0

Nakarta, 19 Oktober 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198102 2 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional
02 - Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas
03 - Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah
04 - Meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri
05 - Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri
06 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4. KEGIATAN : 6114 - Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		2.322.000,0
06.01	Presentase Penyelesaian Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Bangda	100	
06.02	Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Bangda yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri	2	
Total			2.322.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06	*Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah*										2.322.000,0
06.EAJ	Layanan Data dan Informasi										2.322.000,0
06.EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi								000 - Bukan Tematik		2.322.000,0
	051 - Pengelolaan Data dan Informasi										2.322.000,0
		Pusat	Pusat								2.322.000,0
Total											2.322.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah				2.322.000,0				5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0
06.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		2.322.000,0				5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0
06.EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi	1	Layanan		2.322.000,0	1	1	1	5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0
06.EAJ.001.051	Pengelolaan Data dan Informasi	1,0	Layanan	2.322.000,0	2.322.000,0	1,0	1,0	1,0	5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0
Total					2.322.000,0	-	-	-	5.805.000,0	14.512.500,0	36.281.250,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
06	Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0
06.EAJ	Layanan Data dan Informasi		2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0
06.EAJ.001	Pengelolaan Data dan Informasi		2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0
06.EAJ.001.051	Pengelolaan Data dan Informasi	Pendukung	2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0
Total			2.322.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.322.000,0

Jakarta, 19 Oktober 2020
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
NIP. 19611030 198702 2 001

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan 12750

Telp. (021) 7942651 - 7942653, Website: www.kemendagri.go.id